



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM
3. NHK : 967204

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.527.020.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 581.920.000
2. Tanah Seluas 164 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 20.992.000
3. Tanah Seluas 2741 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 350.848.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.113.840.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 459.420.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **94.000.000**

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO 110 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **242.821.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **1.338.767.540**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.584.365.206**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **5.786.973.746**



III. HUTANG

Rp. 21.458.832

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.765.514.914

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.